



MENDARAT DI SUPADIO: Personel helikopter Chinook milik Republic of Singapore Air Force (RSAF) mengecek mesin heli ketika singgah di Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Selasa (22/3). Dua helikopter Chinook berpenumpang 28 personel militer itu akan kembali ke negaranya setelah Latihan Bersama Penanggulangan Bencana Alam ARF DIREx di Manado, Sulawesi Utara.

ANTARA/JESSICA WUYANG

Demokrat Sulit Kendalikan Golkar dan PKS

Presiden seharusnya percaya diri memimpin pemerintahan karena dipilih langsung rakyat, bukan dipilih koalisi partai.

ANATA SYAH FITRI

PARTAI Demokrat akhirnya mengaku pasrah dalam menghadapi partai yang sering berbeda sikapnya dengan kebijakan koalisi Sekretariat Gabungan (setgab) partai pendukung pemerintah. Partai penguasa itu masih belum berani memasukkan klausul penjatihan hukuman ke dalam kontrak koalisi yang baru.

"Tinggal tiga tahun lagi ini, biarkan saja. Partai Golkar itu pemain lama, ahli bermain. Biarkan saja mereka bermain," ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarak di Jakarta, kemarin.

Sejauh ini, upaya penataan kembali koalisi setgab baru sampai pada moratorium saling serang sesama anggota koalisi. Itu pun hanya sebatas kesepakatan lisan.

Partai Demokrat juga mu-

lai mengurangi dominasinya di setgab sehingga tidak lagi memegang penuh kendali. Menurut Mubarak, kontrak politik yang telah disepakati membebaskan anggota koalisi tetap kritis.

"Tapi tetap harmonis mendukung pemerintahan. Golkar kan partai yang berkarya. Selama ada pekerjaan, Golkar bagus. Kalau tidak ada pekerjaan, baru mereka membuat manuver politik. Jadi beri saja mereka pekerjaan," kata dia.

Sementara itu, soal nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diakuinya masih di wilayah abu-abu dalam koalisi. Mubarak mengatakan, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan kesepakatan partai itu di koalisi.

"Lagi pula mereka kan sekarang juga sedang sibuk di inter-

“ Selama ada pekerjaan, Golkar bagus. Kalau tidak ada pekerjaan, baru mereka membuat manuver politik. Jadi beri saja mereka pekerjaan.”

Ahmad Mubarak
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat

nal. Biarkan saja," kata dia.

Saat ditemui di kesempatan berbeda, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa meminta Partai Demokrat segera menghentikan wacana perlunya rombak ulang kontrak koalisi.

Menurutnya, upaya Partai Demokrat untuk merumuskan ulang bentuk kontrak koalisi itu akan berakhir sia-sia selagi Presiden selaku Ketua Setgab hanya memikirkan dukungan politik dari DPR. Presiden harusnya percaya diri dalam

memimpin karena dipilih langsung oleh rakyat.

"Harusnya presiden mengutamakan kabinet dan kinerjanya. Abaikan setgab, abaikan parlemen, utamakan kabinet. Kenapa terlalu sibuk dengan parlemen dan koalisi?" tanya Agun.

Sementara itu, PKS menanggapi dingin wacana perombakan kontrak koalisi. Menurut Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta, ia tidak tahu-menahu akan rencana itu karena pihaknya tidak pernah diajak membicarakannya.

"PKS belum mendapatkan informasi mengenai hasil kesepakatan tersebut. PKS juga tidak pernah menerima undangan untuk membahas kesepakatan baru dalam setgab. Tapi kami tidak risau, meski tak dilibatkan," ujarnya.

Cemburu

Salah satu anggota koalisi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetap mendesak dirombaknya kontrak kerja koalisi yang ada saat ini. Menurut Sekretaris Jenderal PPP Irgan

Chairul Mahfiz, pemberian hukuman dan penghargaan harus masuk dan dijabarkan secara tegas di dalam kontrak yang baru.

"Kontrak politik yang baru ini akan efektif seandainya mitra koalisi duduk kembali membicarakan secara tuntas berbagai persoalan, sehingga tidak ada sekat komunikasi, yang menyebabkan setiap pihak mengambil keputusannya sendiri," urainya.

Di tempat berbeda, pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya menilai Presiden tetap perlu mengubah kontrak politik, termasuk soal posisi Ketua Harian Setgab yang saat ini dipegang Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar.

"Di situ muncul kecemburuan yang dapat berujung konflik. Posisi penting seperti Ketua Harian diberikan begitu saja pada salah satu partai yang baru masuk belakangan. Jadi wajar saja kalau kemudian timbul kecemburuan," kata Yunarto. (P-2)

anata@mediaindonesia.com

DINAMIKA

Perusahaan Bermasalah Incar Proyek Gedung DPR

SEJUMLAH perusahaan bermasalah diduga masuk proses tender gedung baru DPR. Perusahaan itu termasuk daftar wanprestasi pada pembangunan rumah jabatan anggota DPR.

Dua perusahaan dari sembilan perusahaan yang telah mendaftar prakualifikasi peserta tender proyek gedung baru DPR bermasalah. Padahal, keduanya termasuk perusahaan yang dinilai bermasalah dalam pembangunan rumah jabatan anggota (RJA) DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. "Jika perusahaan-perusahaan tersebut sampai lolos, semakin kuat dugaan adanya permainan dalam proyek tersebut," ujar Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan di Jakarta, kemarin.

Menurut data Fitra, pada kasus proyek rumah jabatan anggota DPR Kalibata, diduga terjadi keterlambatan penyelesaian proyek dan pembengkakan anggaran. Yuna menilai, proyek tersebut bermasalah karena adanya praktik subkontrak dari perusahaan pemenang tender ke perusahaan lainnya. (NA/P-3)

Menko Polhukam Tepis Isu Dewan Jenderal

MENKO Polhukam Djoko Suyanto mengatakan tidak ada aksi kudeta yang didalangi sejumlah jenderal. Hal itu menjawab informasi soal dewan revolusi Islam yang di dalamnya terdapat sejumlah mantan pejabat dan purnawirawan jenderal. "Saya memang sudah mendengar informasi itu sejak 10 hari lalu, tetapi tidak ada," kata Djoko di sela-sela pembukaan Dialog Pertahanan Internasional Jakarta, kemarin.

Djoko menegaskan, Indonesia sudah berada dalam koridor demokrasi. "Kita kan sudah mengembangkan demokrasi di negara kita," katanya.

Ia menjelaskan, tahapan demokrasi sudah ditentukan dan diatur undang-undang. Sesuai kesepakatan, dalam meneruskan tahapan-tahapan demokrasi dengan DPR melalui platform politik. Sejumlah purnawirawan jenderal bintang tiga disebut-sebut berada di balik gerakan anti-Ahmadiyah, serta kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Indonesia, demikian lansir *Aljazeera* pada Selasa (22/3). (Nav/P-3)

Nunun Hambat KPK Usut Kasus Cek Pelawat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku hingga kini belum bisa menetapkan tersangka baru dalam kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia akibat ketidakhadiran saksi kunci Nunun Nurbaetie dan Adang Daradjatun.

"Satu hal yang perlu kita sampaikan adalah untuk meminta keterangan Bu Nunun. Dan sampai hari ini kita memang belum bisa menghadirkan Bu Nunun sebagai saksi dalam kasus ini," ujar juru bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, kemarin.

"Dia memang salah satu saksi yang ingin kita dengar keterangannya," lanjutnya.

Kendati ketidakhadiran saksi kunci Nunun menjadi kendala dalam penyidikan yang dilakukan KPK, Johan menegaskan bahwa itu tidak berarti kasus suap cek pelawat berhenti sampai di situ saja. (*P-3)

Calon Perseorangan Terancam Dihapus dari Pemilu Kadal

DENGAN dalih efektivitas pemerintahan, keberadaan calon kepala daerah yang berasal dari perseorangan atau independen bakal ditiadakan. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menilai keberadaan calon kepala daerah independen itu tidak melanggar konstitusi.

Ketua Poksi F-PDIP di Badan Legislasi (Baleg) DPR Arif Wibowo di Jakarta, kemarin, menegaskan fraksinya akan menghapus keberadaan calon kepala daerah independen dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kadal).

"Sikap resmi PDIP menolak calon perseorangan dalam pemilu kadal," ujar Arif.

Menurut dia, penghapusan kepala daerah perseorangan terkait dengan efektivitas pemerintahan serta menghindari konflik antara kepala daerah dan DPRD.

Pertimbangan lainnya, lanjut dia, adalah pertanggungjawaban kinerja. "Kepada institusi apa kita mengklarifikasi bila ia bersalah. Kalau calon dari parpol kan mudah, tinggal minta pertanggungjawaban parpol," ujarnya.

Guru besar ilmu politik Universitas Airlangga (Unair) Ramlan Surbakti mengakui, kepala daerah independen akan menimbulkan *divided government* (pemerintahan daerah terbelah).

Sebab, lanjut dia, kepala daerah dari unsur perseorangan sulit diterima oleh kekuatan parpol di DPRD. "Yang terjadi adalah saat kepala daerah mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) ditolak oleh DPRD. Sebaliknya, usulan DPRD ditolak oleh kepala daerah. Hasilnya, pemerintah jalan di tempat," ujarnya.

Pada 23 Juli 2007, MK telah mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Lalu Ranggalawe dan membuka pintu bagi calon independen dalam pemilu kadal.

MK berpendapat pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, calon perseorangan yang dibuka di Aceh tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. (*P-1)

Mendagri Nonaktifkan Gubernur Sumut

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) telah resmi menonaktifkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin yang juga terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Langkat pada 2000-2007.

"Kemendagri sudah menerima keppres (keputusan presiden) pemberhentian sementara Gubernur Sumut. Keppres itu kami terima pada Selasa (22/3)," terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenoek, di Jakarta, kemarin.

Mekanisme nonaktif dilakukan menurut Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah. Dalam Pasal 126 disebutkan, kepala daerah yang didakwa kasus tindak pidana korupsi diberhentikan sementara tanpa melalui usulan dari DPRD.

Kemendagri telah meminta nomor registrasi perkara ketika Syamsul menjalani persidangan perdana, pekan lalu. Setelah menerima nomor registrasi perkara Syamsul, tuturnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengirimkan surat permohonan pemberhentian sementara kepada Presiden.

Syamsul didakwa telah mem-



Syamsul Arifin
Gubernur Sumut nonaktif

perkaya diri dan melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mantan Bupati Langkat itu terancam hukuman penjara 20 tahun. Akan tetapi, Syamsul menyatakan ti-

dak akan mengajukan bantahan atau eksepsi terhadap dakwaan jaks penuntut umum.

Akibat perbuatan Syamsul, negara diduga mengalami kerugian hingga sebesar Rp97,8 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan dialirkan kepada anggota keluarganya, seperti Fatimah Habibi (istri), Aisia Samira dan Beby Arbiana (anak), Syah Afandin/Ondim dan Lela Wongso atau Iel (adik), Noor Jigan (keponakan), serta ibundanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahani Syamsul sejak Oktober 2010. Aset-aset yang dimiliki Syam-

ul, yakni mobil Jaguar dan dua buah rumah yang berada di perumahan Rafless Hill, Depok dan di Jalan Siaga Raya Nomor 110, Pejaten, Jakarta Selatan, telah disita KPK.

Penonaktifan Syamsul menambah daftar panjang kepala daerah yang berada di balik tahanan. Sebelumnya, Mendagri sudah memberhentikan Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo dan Wali Kota Tomohon Jefferson MS Rumajar.

Menurut KPK, sebanyak 17 gubernur dan 158 bupati serta wali kota terjerat dalam tindak pidana korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. (*P-4)

TelkomVision

FLEXI
Lebih Irit Kan!

mandiri call 14000
atau (021) 5299-7777 mandiri

Berlangganan TelkomVision

GRATIS! Modem FlexiNet +
Internet Unlimited 1 tahun

Khusus untuk pemegang mandiri kartu kredit

www.mandirikartukredit.com/powerbillstelvis.php

Paket Emas

Rp275ribu
per bulan*

*Syarat & ketentuan berlaku.
Harga belum termasuk PPN.